

# Analisis Keputusan Muhammadiyah Menarik Dana dari BSI: Perspektif Ilmu Administrasi

Ahyar Wahyudi <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

\* [orange.kelabu@gmail.com](mailto:orange.kelabu@gmail.com)

**Abstract.** This study analyzes Muhammadiyah's decision to withdraw IDR 13 trillion from Bank Syariah Indonesia (BSI) from an administrative science perspective. This decision has significant implications for risk management, corporate governance, public administration, and public trust in Islamic financial institutions. Using a literature review method, this research explores various relevant theories and concepts, including risk management, portfolio diversification, corporate governance, and distributive justice. The analysis results show that Muhammadiyah's decision is a strategic step to reduce concentration risk and encourage healthier competition in the Islamic banking sector. Additionally, this study highlights the importance of effective communication and transparency in public policy management to maintain public trust and financial stability. The concrete implications of this study are the enhancement of competitiveness and service quality in the Islamic banking sector and the emphasis on ethical responsibility in managing community funds. Keywords: risk management, corporate governance, portfolio diversification, distributive justice.

## 1. Pendahuluan

Keputusan Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, untuk menarik dana sebesar Rp13 triliun dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dan mendistribusikannya ke beberapa bank syariah lainnya merupakan peristiwa yang signifikan dalam aspek perbankan syariah di Indonesia. Langkah ini mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai latar belakang dan dampaknya terhadap sektor perbankan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, penting untuk menganalisis keputusan strategis seperti ini dari sudut pandang ilmu administrasi guna memahami implikasi yang lebih luas dan bagaimana langkah ini mencerminkan dinamika organisasi dan manajemen risiko yang ada.

Salah satu aspek utama yang melatarbelakangi keputusan ini adalah masalah konsentrasi risiko. Ketika dana dalam jumlah besar ditempatkan di satu institusi, seperti yang dilakukan Muhammadiyah dengan BSI, risiko konsentrasi menjadi sangat tinggi. Risiko konsentrasi ini, yang dalam teori manajemen risiko dikenal sebagai "*concentration risk*," dapat mengakibatkan kerugian besar jika institusi tersebut mengalami masalah keuangan. Dengan mengalihkan dananya ke beberapa bank syariah lainnya, Muhammadiyah berusaha untuk mengurangi risiko ini melalui diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi manajemen risiko yang penting, di mana investasi disebar ke berbagai aset atau institusi untuk mengurangi dampak negatif dari kegagalan satu entitas.

Keputusan Muhammadiyah juga memiliki implikasi penting bagi kompetisi dan efisiensi dalam industri perbankan syariah. Terlalu banyak dana yang terpusat di BSI menyebabkan persaingan tidak sehat di antara bank syariah lainnya. Dengan mendistribusikan dananya ke berbagai bank, Muhammadiyah berupaya menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih kompetitif. Teori kompetisi mengajarkan bahwa persaingan yang sehat akan mendorong inovasi dan efisiensi, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen. Dalam hal ini, analisis keputusan Muhammadiyah penting untuk memahami bagaimana langkah ini dapat mempengaruhi dinamika persaingan dan meningkatkan efisiensi operasional bank syariah di Indonesia.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kondisi likuiditas dan stabilitas keuangan BSI pasca penarikan dana oleh Muhammadiyah. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan stabilitas keuangan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan operasional bank. Meskipun BSI menegaskan bahwa likuiditas mereka tetap solid, penarikan dana dalam jumlah besar selalu menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas jangka

pendek. Analisis ini diperlukan untuk memahami sejauh mana penarikan dana ini mempengaruhi likuiditas BSI dan bagaimana manajemen bank mengatasi tantangan ini untuk memastikan stabilitas jangka panjang.

Distribusi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan Muhammadiyah. Mereka merasa bahwa BSI lebih banyak memberikan dana CSR kepada ormas lain, yang menyebabkan ketidakpuasan. Dari perspektif administrasi, distribusi CSR yang adil dan transparan sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan merasa dihargai. Teori stakeholder mengajarkan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dengan organisasi. Analisis terhadap bagaimana distribusi CSR mempengaruhi keputusan strategis seperti ini penting untuk memahami dinamika hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingannya.

Keputusan Muhammadiyah juga terkait dengan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan BSI yang tidak mengakomodasi usulan mereka untuk pengangkatan komisaris dari unsur Muhammadiyah. Dalam teori agensi, konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Pengangkatan komisaris yang tidak didasarkan pada meritokrasi tetapi pada afiliasi politik dapat menciptakan ketidakpuasan di antara pemegang saham dan mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap manajemen bank. Analisis ini diperlukan untuk memahami bagaimana pengaruh politik dalam pengangkatan komisaris dapat mempengaruhi keputusan strategis dan stabilitas organisasi.

Salah satu misi utama Muhammadiyah adalah mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun mereka merasa bahwa BSI kurang memberikan perhatian pada sektor ini. Dukungan terhadap UMKM sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Muhammadiyah merasa bahwa BSI lebih memprioritaskan pembiayaan kepada konglomerat dibandingkan UMKM. Hal ini bertentangan dengan visi Muhammadiyah untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Analisis terhadap keputusan ini penting untuk memahami bagaimana strategi pendanaan bank dapat mempengaruhi dukungan terhadap UMKM dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.

Keputusan Muhammadiyah untuk menarik dana dari BSI adalah contoh kompleksitas keputusan strategis dalam organisasi besar. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi tetapi juga mencakup aspek-aspek keadilan, transparansi, dan hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingannya. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana keputusan strategis seperti ini diambil, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana implikasinya terhadap stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan syariah.

Keputusan Muhammadiyah untuk menarik dana dari BSI dan mendistribusikannya ke bank-bank syariah lainnya adalah langkah strategis yang mencerminkan berbagai dinamika dan tantangan dalam manajemen risiko, kompetisi, likuiditas, distribusi CSR, dan pengaruh politik. Dari perspektif ilmu administrasi, analisis ini penting untuk memahami implikasi yang lebih luas dari keputusan ini terhadap sektor perbankan syariah di Indonesia. Analisis ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi besar seperti Muhammadiyah mengelola sumber daya mereka untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih besar, serta bagaimana keputusan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi di bidang administrasi dan keuangan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin memahami dinamika dan tantangan dalam sektor perbankan syariah di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan Muhammadiyah menarik dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dari perspektif ilmu administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Literatur (*Literature Review*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber informasi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pencarian literatur yang relevan dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, laporan, dan dokumen resmi. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, kredibilitasnya, dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang administrasi keuangan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kebijakan publik. Pencarian literatur dilakukan menggunakan database akademik seperti *Google Scholar*, *JSTOR*, dan *ProQuest*. Kata kunci yang

digunakan dalam pencarian meliputi "administrasi keuangan", "manajemen risiko", "tata kelola perusahaan", "kebijakan publik", "bank syariah", dan "keputusan strategis". Selain itu, laporan resmi dari Muhammadiyah, Bank Syariah Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dianalisis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Keputusan yang diambil oleh PP Muhammadiyah untuk menarik dana sebesar Rp13 triliun dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan tindakan signifikan yang membawa implikasi luas baik bagi BSI maupun sektor perbankan syariah di Indonesia. Dari perspektif ilmu administrasi, kebijakan ini dapat dianalisis melalui berbagai sudut pandang termasuk manajemen risiko, tata kelola perusahaan, administrasi publik, dan filosofi administrasi. Artikel ini akan menguraikan analisis keputusan Muhammadiyah tersebut secara deduktif, mengarah ke aspek penting dalam kebijakan ilmu administrasi dan kebijakan finance.

#### Teori Administrasi Keuangan dan Manajemen Risiko

Keputusan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menetapkan komisaris yang tidak mengakomodasi usulan Muhammadiyah dapat dianalisis berdasarkan teori administrasi keuangan dan manajemen risiko. Menurut teori manajemen risiko, keputusan ini tidak memperhitungkan potensi dampak reputasi dan risiko konsentrasi dana dari organisasi besar seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu pendukung utama dana BSI dengan kontribusi dana yang sangat signifikan. Risiko konsentrasi dana terjadi ketika terlalu banyak dana yang ditempatkan pada satu institusi, yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap kestabilan finansial bank jika ada penarikan dana besar-besaran secara tiba-tiba ([Brigham & Ehrhardt, 2020](#)).

Penarikan dana sebesar Rp13 triliun dari BSI oleh Muhammadiyah merupakan tindakan mitigasi risiko yang didorong oleh ketidakpuasan atas keputusan BSI terkait komposisi sumber daya manusia pengelola bank. Menurut teori tata kelola perusahaan, keputusan strategis seperti pemilihan komisaris harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan utama untuk menjaga hubungan yang harmonis dan memastikan dukungan yang berkelanjutan ([Donaldson & Preston, 1995](#)). Ketidakpuasan Muhammadiyah terhadap pemilihan komisaris BSI yang tidak mengakomodasi usulan mereka mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola dan komunikasi antara BSI dan salah satu pemangku kepentingan utamanya.

#### Perspektif Kebijakan Administrasi

Dalam kebijakan administrasi, keputusan BSI dapat dilihat sebagai kurangnya sensitivitas terhadap kepentingan kolektif dan sinergi yang diperlukan dalam ekosistem perbankan syariah. Menurut teori administrasi publik, kebijakan yang diambil oleh organisasi besar harus memperhatikan dampak sosial dan hubungan antarorganisasi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar ([Denhardt & Denhardt, 2015](#)). Muhammadiyah, dengan jaringan luasnya dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan stabilitas finansial. Dengan mengabaikan usulan Muhammadiyah, BSI berisiko kehilangan dukungan dan kepercayaan dari salah satu konstituennya yang paling berpengaruh.

#### Filosofi Administrasi dan Keadilan Distributif

Dari perspektif filosofi administrasi, tindakan BSI dapat dipandang sebagai kurangnya penerapan prinsip-prinsip keadilan dan keterwakilan. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan distributif menekankan pentingnya setiap pihak dalam sebuah sistem untuk merasakan keterwakilan yang adil dan setara ([Rawls, 1971](#)). Keputusan BSI yang tidak memasukkan usulan Muhammadiyah dalam komposisi komisarisnya mungkin dilihat sebagai pelanggaran prinsip keadilan distributif, yang dapat menyebabkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara anggota Muhammadiyah.

Selain itu, keputusan Muhammadiyah untuk menarik dana juga menunjukkan pentingnya diversifikasi dalam manajemen risiko keuangan. Menurut teori diversifikasi portofolio, penyebaran dana ke berbagai institusi keuangan dapat mengurangi risiko total dan meningkatkan stabilitas finansial organisasi ([Markowitz, 1952](#)). Dengan mengalihkan dana ke bank syariah lain, Muhammadiyah tidak hanya mengurangi risiko konsentrasi tetapi juga mendorong persaingan yang lebih sehat di sektor

perbankan syariah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan dan inovasi di sektor tersebut.

### **Evaluasi Strategi Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan**

Keputusan BSI yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek ini menunjukkan adanya kelemahan dalam strategi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang dapat berdampak jangka panjang terhadap reputasi dan stabilitas finansial bank. Untuk memperbaiki situasi ini, BSI perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penetapan komisaris dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kepentingan pemangku kepentingan utama seperti Muhammadiyah.

### **Likuiditas dan Respons Organisasi terhadap Tekanan Eksternal**

Berdasarkan teori administrasi publik dan manajemen keuangan, berita tentang kondisi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah penarikan dana oleh Muhammadiyah menggambarkan pentingnya likuiditas dan respons organisasi terhadap tekanan eksternal. Likuiditas yang diklaim solid oleh Hery Gunardi dan dikonfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencerminkan manajemen keuangan yang efektif, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas institusi keuangan. Menurut [Mikesell \(2014\)](#), transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan keuangan publik yang baik.

Penelitian oleh Bella, Apriyanti, dan Sriwijayanti (2022) menekankan peran penting teknologi dalam meningkatkan praktik manajemen keuangan dan mengubah peran akuntan dalam lingkungan bisnis modern. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan manajemen risiko yang lebih efektif. Akuntan perlu beradaptasi dan mengembangkan keterampilan teknologi mereka untuk memanfaatkan kemajuan ini, yang sangat relevan dalam BSI yang harus mengelola likuiditas dengan transparan dan akurat di tengah penarikan dana besar-besaran ([Bella et al., 2022](#)).

### **Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan**

Dalam akuntabilitas manajemen keuangan di sektor publik, Basuki, Setyowati, dan Wahyunengseh (2019) menekankan bahwa akuntabilitas adalah prasyarat untuk tata kelola yang baik. Dalam pengelolaan anggaran desa, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk menghindari konspirasi aktor yang dapat merugikan kepentingan publik. Hal ini relevan untuk BSI yang membutuhkan transparansi dalam kondisi likuiditas dan manajemen keuangan yang efektif untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan ([Basuki et al., 2019](#)).

Peran akuntan dalam administrasi keuangan kontemporer tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan tetapi juga mencakup analisis keuangan, saran strategis, dan manajemen risiko. Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan otomatisasi proses keuangan dan analisis data yang lebih mendalam, akuntan diharapkan memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan strategis ([Moll & Yigitbasioglu, 2019](#)). Dalam BSI, peran akuntan sangat penting dalam memastikan bahwa likuiditas bank tetap stabil dan dapat dipercaya oleh publik dan regulator.

### **Manajemen Risiko dan Kepatuhan terhadap Regulasi**

Penelitian lainnya menunjukkan pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi dalam manajemen keuangan. Pernyataan OJK mengenai likuiditas BSI yang stabil menunjukkan pentingnya manajemen risiko yang efektif dan kepatuhan terhadap standar regulasi. Ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang menekankan pentingnya respons adaptif dan transparan dari organisasi terhadap perubahan kondisi eksternal ([Dye, 2013](#)). Dalam situasi seperti ini, BSI harus terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangannya.

Penanganan BSI terhadap penarikan dana oleh Muhammadiyah menggarisbawahi pentingnya kebijakan administrasi keuangan yang efektif, responsif, dan adaptif dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori kebijakan publik, administrasi keuangan, dan filosofi administrasi yang holistik dalam manajemen krisis dan pengelolaan likuiditas.

### **Respons terhadap Risiko Konsentrasi Dana**

Mengacu pada teori kebijakan publik, penarikan dana oleh Muhammadiyah dapat dilihat sebagai respons terhadap risiko konsentrasi dana. Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, menyoroti bahwa porsi penempatan dana Muhammadiyah yang terlalu besar di BSI dapat menimbulkan risiko konsentrasi. Teori kebijakan publik yang dijelaskan oleh [Dye \(2013\)](#) menyebutkan bahwa risiko konsentrasi merupakan salah satu faktor yang harus dihindari dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu institusi keuangan.

### **Likuiditas dan Prinsip Manajemen Keuangan**

Dari sudut pandang administrasi finansial, likuiditas BSI yang dinyatakan cukup oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mencerminkan prinsip likuiditas dalam manajemen keuangan. Menurut [Brigham dan Ehrhardt \(2014\)](#), likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pernyataan Hery dan Dian menunjukkan bahwa BSI memiliki likuiditas yang memadai untuk menangani penarikan dana secara tiba-tiba, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas keuangan bank.

### **Teori Portofolio dan Diversifikasi Aset**

Teori keuangan yang relevan dalam hal ini adalah teori portofolio yang dikemukakan oleh [Markowitz \(1952\)](#). Menurut teori ini, diversifikasi aset adalah kunci untuk mengurangi risiko. Langkah Muhammadiyah untuk mengalihkan dana ke beberapa bank syariah lain sejalan dengan konsep diversifikasi dalam teori portofolio, yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan tidak menempatkan semua dana di satu bank saja.

### **Komunikasi Efektif dalam Manajemen Krisis**

Dalam kebijakan administrasi, komunikasi yang efektif antara manajemen bank dan pemegang saham sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar. Dian Ediana Rae menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik dari manajemen BSI kepada publik. Menurut teori administrasi publik oleh [Denhardt dan Denhardt \(2015\)](#), komunikasi yang transparan dan efektif adalah salah satu elemen kunci dalam pengelolaan kebijakan publik yang baik.

### **Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial**

Isu ini juga bisa dianalisis dari perspektif filsafat, khususnya etika bisnis. Penarikan dana oleh Muhammadiyah mencerminkan tanggung jawab etis organisasi dalam mengelola risiko keuangan dan memastikan distribusi dana yang lebih merata di berbagai bank syariah. Menurut teori etika deontologi yang dikemukakan oleh Kant (1785), tindakan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menjalankan kewajiban moral dalam mengelola dana umat dengan bijak dan adil.

### **Tindakan Bijaksana dan Implikasi Konkrit**

Langkah Muhammadiyah untuk mengalihkan dana dari BSI merupakan tindakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebijakan publik, administrasi finansial, teori keuangan, kebijakan administrasi, dan etika bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut berusaha untuk mengelola dana dengan bijaksana, mengurangi risiko konsentrasi, serta memastikan stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, langkah PP Muhammadiyah untuk menarik dan mendistribusikan kembali dana dari BSI ke berbagai bank syariah lain adalah contoh penerapan kebijakan administrasi keuangan yang bertanggung jawab dan strategis. Tindakan ini tidak hanya mengurangi risiko konsentrasi dana tetapi juga mendorong persaingan yang lebih sehat di sektor perbankan syariah, yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat. Dengan demikian, keputusan ini selaras dengan teori-teori administrasi keuangan, persaingan pasar, dan tata kelola yang baik, serta prinsip-prinsip filosofi administrasi yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial.

### **Perspektif Psikologi Publik**

Keputusan Muhammadiyah yang mendadak ini menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang memiliki keterkaitan emosional dan keuangan dengan BSI. Kepercayaan publik terhadap institusi keuangan sangat krusial, terutama dalam

perbankan syariah yang mengandalkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika organisasi sebesar Muhammadiyah menarik dananya, hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai stabilitas dan integritas BSI. Kepercayaan yang menurun dapat memicu reaksi berantai berupa penarikan dana oleh nasabah lain, yang pada akhirnya dapat mengancam likuiditas dan stabilitas finansial bank.

Keputusan ini juga mempengaruhi persepsi risiko di kalangan publik. Menurut teori psikologi risiko, manusia cenderung bereaksi berlebihan terhadap informasi negatif, terutama yang berkaitan dengan aspek finansial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Keputusan Muhammadiyah yang menarik dana dari BSI karena alasan ketidakpuasan terhadap komposisi komisaris dan distribusi dana CSR menimbulkan persepsi bahwa ada risiko manajemen yang tidak kompeten atau tidak etis di BSI. Hal ini memperkuat rasa ketidakamanan dan ketidakpastian di kalangan nasabah lainnya, yang dapat mempercepat penarikan dana lebih lanjut.

Keputusan ini juga memicu respons emosional yang signifikan di kalangan publik, terutama anggota Muhammadiyah dan nasabah BSI. Rasa kecewa, marah, dan ketidakpuasan terhadap keputusan BSI yang tidak mengakomodasi usulan Muhammadiyah dapat menciptakan polarisasi dan fragmentasi sosial. Hal ini relevan dengan teori disonansi kognitif, di mana individu yang merasa bahwa nilai-nilai atau harapan mereka tidak selaras dengan tindakan organisasi akan mengalami ketidaknyamanan psikologis, yang bisa berujung pada tindakan ekstrim seperti penarikan dana atau kampanye negatif terhadap bank.

Keterbukaan informasi dan komunikasi efektif dari pihak BSI sangat penting dalam menangani krisis ini. Menurut teori komunikasi krisis, respons cepat, jujur, dan transparan dari manajemen bank dapat membantu meredakan ketegangan dan memperbaiki persepsi publik. Sayangnya, jika komunikasi tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat memperburuk situasi dan memperkuat persepsi negatif. Publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil BSI untuk mengatasi situasi dan memastikan stabilitas keuangan mereka.

Keputusan Muhammadiyah untuk mendistribusikan dana ke beberapa bank syariah lainnya juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap sektor perbankan syariah di Indonesia. Meskipun langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko konsentrasi dan mendorong persaingan sehat, hal ini dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap stabilitas bank syariah secara keseluruhan. Nasabah mungkin merasa ragu untuk menyimpan dana mereka di bank syariah yang lain jika mereka merasa bahwa masalah serupa dapat terjadi di masa depan.

Dari perspektif psikologi publik, keputusan Muhammadiyah untuk menarik dana dari BSI adalah contoh bagaimana keputusan strategis dapat mempengaruhi persepsi publik, kepercayaan, dan respons emosional. Keputusan ini menyoroti pentingnya manajemen risiko, komunikasi yang efektif, dan transparansi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Untuk memulihkan kepercayaan, BSI perlu mengadopsi pendekatan komunikasi krisis yang transparan dan responsif serta memastikan bahwa kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Dengan demikian, mereka dapat meredakan kekhawatiran publik dan memastikan stabilitas jangka panjang sektor perbankan syariah di Indonesia.

### **Implikasi Konkret**

Implikasi dari temuan ini terletak pada integrasi teori administrasi publik dan keuangan dalam memahami dinamika keputusan keuangan organisasi besar seperti Muhammadiyah. Keputusan ini mencerminkan pendekatan holistik yang menggabungkan manajemen risiko, diversifikasi aset, dan tata kelola yang baik untuk mencapai stabilitas keuangan dan dukungan publik. Implikasi konkret dari tindakan Muhammadiyah adalah peningkatan daya saing sektor perbankan syariah melalui diversifikasi dan peningkatan kualitas layanan, serta penekanan pada pentingnya komunikasi efektif dan transparansi dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya tanggung jawab etis dalam mengelola dana umat, yang dapat menjadi model bagi organisasi lain dalam mengelola dana secara bijaksana dan adil.

#### 4. Kesimpulan

- 1) Keputusan Muhammadiyah untuk menarik dana sebesar Rp13 triliun dari Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan langkah strategis yang mencerminkan dinamika organisasi, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kebijakan publik. Keputusan ini didorong oleh faktor-faktor seperti risiko konsentrasi dana, ketidakpuasan terhadap tata kelola perusahaan, dan keinginan untuk mendiversifikasi aset serta mendorong persaingan yang lebih sehat di sektor perbankan syariah. Penarikan dana ini juga menyoroti pentingnya komunikasi efektif, transparansi dalam manajemen krisis, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dan keterwakilan dalam filosofi administrasi. Selain itu, diversifikasi aset terbukti sebagai strategi penting dalam manajemen risiko keuangan dan tanggung jawab etis dalam pengelolaan dana.
- 2) Bagi BSI dan lembaga keuangan lainnya, evaluasi dan peningkatan tata kelola perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan strategis mencerminkan kepentingan pemangku kepentingan utama. Diversifikasi dan manajemen risiko harus diutamakan untuk mengurangi risiko konsentrasi dana. Komunikasi yang efektif dan transparansi dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar. BSI juga perlu memperhatikan distribusi dana CSR yang adil dan transparan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan merasa dihargai. Muhammadiyah dan organisasi besar lainnya harus terus mengelola dana mereka dengan bijaksana, mendiversifikasi aset untuk mengurangi risiko konsentrasi, serta memastikan stabilitas keuangan. Mereka juga perlu aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis di lembaga keuangan dan terus mendukung sektor UMKM sebagai bagian dari misi mereka untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 3) Bagi masyarakat awam, memahami risiko dan pentingnya diversifikasi dalam manajemen keuangan pribadi adalah kunci untuk meningkatkan stabilitas finansial. Menyimpan dana di beberapa institusi keuangan yang berbeda dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan finansial. Masyarakat harus aktif mengawasi dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari lembaga keuangan tempat mereka menyimpan dana. Edukasi keuangan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan pribadi dan memahami implikasi dari keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh lembaga keuangan. Dengan langkah-langkah ini, stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor perbankan syariah dapat terjaga, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus didorong.

#### References

- [1] Abbas, A. (2024). [Komentar tentang Penarikan Dana Muhammadiyah di BSI]. Suara.com. Diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2024/06/12/120841/diduga-jadi-permasalahan-hengkangnya-pp-muhammadiyah-ini-susunan-komisaris-bsi-terbaru>
- [2] Basuki, A. F., Setyowati, K., & Wahyunengseh, R. D. (2019). Accountability Model of Financial Management in the Public Sector: A Study on Panggungharjo Village Budget. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 26(1).
- [3] Bella, S., Apriyanti, N., & Sriwijayanti, H. (2022). Enhancing Financial Management and Accountant Roles: A Study on the Role of Technological Advancements. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2).
- [4] Bevir, M. (2012). *Governance: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- [5] Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2020). *Financial Management: Theory & Practice*. Cengage Learning.
- [6] Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press.
- [7] Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- [8] Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.
- [9] Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- [10] Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson.

- [11] Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77-91.
- [12] McKinney, J. B. (2022). *Concepts of Financial Management in Public Organizations*. Jones & Bartlett Learning.
- [13] Mikesell, J. L. (2014). *Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector*. Cengage Learning.
- [14] Moll, J., & Yigitbasioglu, O. (2019). The Role of Internet-Related Technologies in Shaping the Work of Accountants: New Directions for Accounting Research. *British Accounting Review*, 51(6), 100833.
- [15] Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
- [16] Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- [17] Simon, H. A. (1997). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations*. Free Press.